

# Refleksi Profesionalisme Polri

Chryshnanda DL<sup>1</sup>



## Abstrak :

*Profesionalisme kepolisian merupakan landasan dasar bagi institusi profesi termasuk juga kepolisian. Profesionalisme kepolisian dapat dilihat, diukur dan dirasakan secara signifikan hasilnya oleh masyarakat yaitu adanya jaminan keamanan dan rasa aman warga masyarakat dalam beraktifitas.. Dengan adanya jaminan tersebut masyarakat akan merasa aman nyaman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Produk kinerja baik yang berupa konseptual, managerial, operasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan menunjukkan profesionalitas. Hal ini harus dipertanggung jawabkan secara bertingkat tingkat yang disesuaikan pada konteks atau lingkup tugas masing-masing. Baik secara administrasi, hukum bahkan secara moral sekaligus.*

**Kata Kunci :** *Profesionalisme, integritas, keamanan, rasa aman, sejahtera*

## Pendahuluan

Tulisan ini berusaha menunjukkan tentang profesionalisme kepolisian yang membahas tentang prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum bagi profesi kepolisian, yang dapat dijadikan refleksi dalam membangun profesionalisme Polri. Profesionalisme kepolisian merupakan landasan dasar bagi institusi profesi termasuk juga kepolisian. Untuk dapat hidup tumbuh dan berkembangnya kepolisian, maka pemolisianya adalah untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, mencegah terjadinya gangguan keamanan, membangun kemitraan serta upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Kastorius Sinaga 2008 : "Profesionalitas kepolisian tidaklah bermakna hanya sebatas peningkatan kemampuan teknis aparat kepolisian di tingkat mikro/lapangan. Namun ada perubahan mendasar pada paradigma institusi kepolisian mampu menjadi institusi sipil yang

1. KBP. Dr. Chryshnanda DL, M.Si, Dirlantas Polda Riau, Staf Pengajar pada STIK-PTIK dan Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

independen serta menerapkan konsep pemolisian yang demokratis (*democratic policing system*)”.

Pada konteks Kepolisian sebagai polisi sipil yang demokratis, polisi mampu menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentu bukanlah sebagai alat penguasa ataupun menjadi salah satu cabang kekuasaan yang otonom tanpa dibarengi dengan akuntabilitas publik (Maridjan, 1999, Sinaga 2008).

Profesionalitas kepolisian secara lebih jauh menuntut pengembangan integritas dari semua petugas kepolisian berikut fungsi-fungsi yang ada di dalamnya dengan mengimplementasikan atau mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang modern dengan kinerja yang terukur dan terbuka untuk dinilai oleh publik, serta ada akuntabilitasnya (Suparlan, 2005, Chryshnanda, 2009)

Bila prinsip-prinsip demokratis tidak ditumbuh-kembangkan di dalam kultur organisasi kepolisian bisa jadi akan membawa kesesatan, terutama dalam penggunaan kewenangannya terutama pada tindakan diskresinya. Bayley 1988 menyatakan bahwa diskresi yang berlebihan merupakan potensi yang besar terjadinya korupsi. Dalam negara konstitusional berdasarkan hukum (*rechstaat*), sangat menuntut profesionalitas kepolisian selaku ujung tombak di dalam penegakan hukum.

Bahasan dalam tulisan ini mencakup: integritas, Etika profesi kepolisian, Mewirauaskan birokrasi kepolisian, pembangunan infrastruktur dan teknologi, edukasi dan penyiapan Sumber Daya Manusia, Peran dan posisi kepolisian yang dibutuhkan dalam masyarakat, akuntabilitas dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

Unsur-unsur penting dalam membangun profesionalisme kepolisian mencakup :

**a. Integritas, Semangat dan Skill**

“Jangan menempatkan orang yang salah, atau menempatkan orang yang tidak mempunyai karakter karena akan merusak institusi”.

Membina dan menempatkan sumber daya manusia yang berkarakter memerlukan seni dan ketrampilan (art dan skill). Aset utama institusi bukan hanya sumber daya manusia tetapi sumber daya manusia yang berkarakter. Memilih, menempatkan dan menggunakan sumber daya manusia yang berkarakter memerlukan kepekaan dan feeling yang tepat. Tentu saja berdasar kompetensi dan kinerjanya. Selain itu juga perlu interview sebelum mempromosikan. Promosi jabatan bukanlah rahasia para pejabat sumber daya manusia atau pejabat-pejabat tertentu, kecuali dalam birokrasi yang patrimonial. Para pejabat di bidang sumber daya manusia boleh dikatakan



waktunya habis untuk menginterview atau mencari sumber daya manusia-manusia yang berkarakter. Dalam birokrasi yang patrimonial justru disakralkan dan dianggap sebagai malaikat pencabut nyawa. Karena pendekatannya adalah pendekatan personal.

Menentukan sumber daya manusia yang berkarakter bukan sekedar mengeluarkan surat perintah tetapi juga sebagai bentuk kaderisasi agar di masa mendatang mempunyai sumber daya manusia yang berkarakter (profesional, unggul dan beretika). Dalam menentukan orang yang berkarakter ada 3 ketentuan yang utama yang urut-urutannya adalah :

1. Integritas.
2. Semangat dan
3. Skill.

Dalam birokrasi yang tidak rasional dan korupsi orang-orang yang berkarakter secara sadar atau tidak akan dimatikan, disingkirkan , karena dianggap sebagai ancaman, sebagai pengganggu privilege mereka. Karena core valuenya adalah uang maka Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi merajalela dan tumbuh subur . Orang-orang yang berkarakter ini akan terus disingkirkan di semua level. Maka habislah mereka lama kelamaan karena tidak ada lahan baginya untuk hidup tumbuh dan berkembang.

Institusi yang memiliki orang-orang yang berkarakter akan mampu bertahan dan bersaing bahkan akan unggul. Bahkan negarapun yang memiliki banyak sumber daya manusia yang berkarakter akan menjadi unggul dan menguasai dunia. Tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dijatuhkan, karena kekuatannya mengakar di mana-mana. Cepat untuk bangkit dan mampu menjadi role model di mana-mana, inspiratif, memotivasi, tentu saja karena profesional, unggul dan beretika.

#### b. Kepemimpinan

Kepemimpinan dari semua pemimpin di berbagai level yang mampumenerapkan kepemimpinan yang visioner, transformatif, inovatif, kreatif penuh dengan daya motivasi untuk membangun institusi kepolisian yang profesional, cerdas, modern sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai dan system-sistem yang dibangunnya bisa dikatakan temporer, reaktif, parsial, bahkan bisa jadi malah meninggalkan bom waktu. Kesalahan masa kini memamatkan generasi mendatang.

#### c. Nilai-Nilai Budaya.

Nilai-nilai budaya kepolisian yang dijadikan *frame work* atau *faith* bagi anggota kepolisian adalah humanisme, kesadaran, tanggung jawab sebagai bagian spirit sang penjaga kehidupan, sang pembangun peradaban serta sebagai sang pejuang kemanusiaan.

Core values, adalah nilai-nilai inti yang merupakan kategori utama dari sistem nilai (*value system*). Sistem nilai merupakan seperangkat nilai-nilai etis (*moral*) yang konsisten dan lebih khusus pada personal dan nilai-nilai budaya. Dan standar pengukurannya (*clarification needed*) pada pencapaian tujuan yang ideal baik secara etik atau secara ideologis.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok motto suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu : Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas). Sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut. Kepercayaan yang tertanam (*believe system*) yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat).

#### d. Mewirauaskan Birokrasi Kepolisian.

Membaca buku *reinventing government* (mewirauaskan birokrasi) karangan David Osborne dan Ted Gaebler, sebagai upaya mentransformasi semangat wirausaha dalam sektor publik. Buku ini menjadi inspirasi untuk mereformasi birokrasi dan menjadi sebuah teks book yang menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa yang belajar tentang manajemen, administrasi publik dsb.

Apa yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Gaebler bisa di jadikan acuan dalam reformasi birokrasi kepolisian. Dalam buku itu dicontohkan bagaimana polisi amerika mampu mewirauaskan institusinya. Hal yang kritikal yang dapat diimplementasikan bagi reformasi birokrasi kepolisian dengan mengacu apa yang ditunjukkan dalam bukunya David Osborne dan Ted Gaebler adalah sbb:

1. Kepolisian yang katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh.
2. Kepolisian milik masyarakat : memberi wewenang ketimbang melayani.
3. Kepolisian yang kompetitif : menyuntikan pesaing kedalam pemberian pelayanan.
4. Kepolisian yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan peraturan.  
Kepolisian yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan.



5. Kepolisian yang berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
6. Kepolisian wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan.
7. Kepolisian yang antisipatif: mencegah daripada mengobati.
8. Kepolisian desentralisasi.
9. Kepolisian yang berorientasi pasar.

10 langkah yang ditawarkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler merupakan suatu wacana baru atau terobosan baru bagi birokrasi (termasuk kepolisian) untuk selalu kreatif, inovatif, memberdayakan potensi, merevitalisasi potensi-potensi dan peluang yang sudah layu. Membangkitkan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bukan kepada birokrasi apalagi bagi ndoro-ndoro penguasa atau pejabatnya. Yang sering tanpa pikir panjang meneriakkan siap tanpa menjabarkan tanpa mengkritisi dan langsung dikerjakan walau dipaksakan dan salah namun tetapi dilakukan, karena sebagai bukti dari buluh bekti glonodng pangareng areng, agar ndoro senang. Tak apa masyarakat nggak senang yang penting ndoro senang cukuplah. Semangat seperti ini memalukan bagi para birokrat, tentu saja yang dikerjakan tidak tulus dan sebatas seremonial atau supervisial.

**e. Etika Profesi Kepolisian.**

Dalam suatu institusi memiliki sasaran dan tujuan yang akan dicapai, yang tercermin dari visi dan misinya. Pada institusi yang profesional akan memiliki standar kerja yang tinggi yang menjadi pedoman kerja bagi para aparaturnya atau para petugasnya. Bagi institusi yang tidak mempunyai standar atau mempunyai standar yang rendah, biasanya tidak profesional boleh dikatakan serampangan dan banyak peluang terjadinya penyimpangan. Semakin rendah standar dari suatu institusi semakin rendah kualitas kinerja, demikian juga sebaliknya, semakin tinggi standarnya semakin tinggi kualitas kinerjanya. Semakin tinggi standarnya akan semakin disiplin dan pemenuhan standar produk kinerjanya pun dapat dikatakan akan memberikan jaminan mutu akan kualitasnya. Kualitas kinerja semakin tinggi akan semakin mampu mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada institusi juga pada masyarakat bahkan bangsa dan negara.

Dalam suatu institusi memang perlu ada jabaran kerja (job description) dan analisa kerja (job analysis) sebagai panduan kerja. Sehingga dalam bekerja ada standarnya dan ada acuannya yang berupa standarisasi keberhasilan. Untuk menjabarkan keberhasilan kerja maka perlu ada sistem penilaian kinerja, sehingga kinerja dari suatu institusi dapat terukur. Untuk memberikan penghargaan yang berprestasi dan menindak yang

menyimpang atau memberi sanksi bagi yang tidak produktif maka perlu adanya sistem reward dan punishment

Dari kesemua hal di atas masih perlu dijabarkan lagi dalam berbagai bidang salah satunya adalah etika kerja. Yang dapat digunakan sebagai pedoman moral bagi para anggota institusi sehingga dalam bekerjanya tidak melenceng kanan dan kiri, yang juga dapat difungsikan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab secara internal maupun eksternal.

Etika kerja dapat dijabarkan sebagai pedoman moral para anggota institusi yang memuat :

1. Apa yang harus dilakukan.
2. Apa yang tidak boleh dilakukan.
3. Produk-produk kinerja yang harus dihasilkan dan
4. Sanksinya apabila melanggar.

#### f. Pembangunan Infrastruktur dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

*“Hidup kalau ingin enak, harus kaya*

*Hidup kalau ingin mudah, harus pandai*

*Hidup kalau ingin indah, harus tabu seni”*

Ungkapan tersebut seakan sebuah kalimat yang sederhana dan terkesan main-main namun maknanya cukup dalam untuk diimplementasikan. Seorang pemimpin yang memiliki 3 hal tersebut walau belum sempurna seutuhnya antara lain :

1. Raffles, ia memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup, sebagai gubernur jenderal, dia memahami dan bisa menikmati seni. Apa prestasinya? Membangun Singapura di semenanjung malaka, menulis berbagai buku ilmiah yang sangat bermanfaat hingga masa kini (salah satunya histori of java), menemukan berbagai jenis tanaman (bunga rafflesia arnoldi), memerintahkan untuk dibuka kembali (borobudur, dsb).
2. Kaisar meiji yang peduli akan 3 pilar di atas hingga mampu membawa Jepang menjadi negara modern.

Salah satu tanda dari modernitas adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menonjol, yang diimplementasikan dalam berbagai infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Infrastruktur merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan suatu institusi sehingga mampu hidup tumbuh dan berkembang.



Dalam negara yang maju, modern infrastruktur menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada publik. Infrastruktur tersebut yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari modernisasi suatu masyarakat. Yang memudahkan, mempercepat, mengamankan, membuat nyaman, memperidah dan memperkaya (bukan hanya dimanfaatkan sendiri namun dapat menjadi industri).

Ilmu pengetahuan dan teknologi (ilpengtek) merubah perilaku dan budaya masyarakat tatkala diterapkan sebagai infrastruktur dan sistem-sistem yang modern. Membuat orang mau tidak mau mentaati aturan atau hukum yang berlaku. Membuat orang semakin mudah mengakses, namun semakin patuh. Karena pengawasan melalui kamera CCTV dan sistem-sistem penegakkan hukum akan lebih efektif karena semua digerakan dalam sistem yang on line dan terpadu.

Apa perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sebuah institusi kepolisian ? Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi tentu kepolisian akan menjadi tertinggal karena kuno, tidak mampu bersaing, akan sulit menyesuaikan dan mengikuti perkembangan. Biasanya akan ditinggalkan bahkan kalau perlu dipangkas karena menjadi beban bagi yang lain. Institusi yang maju maka infrastrukturnya akan selalu modern dan dinamis terus mengikuti dinamika perubahan. Tentu saja bukan menjadi konsumtif tetapi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Perubahan yang begitu cepat dari ilpengtek adalah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, listrik, shg menjadi revolusi industri. Pada saat sekarang berkembang lagi di bidang komunikasi dan transportasi. Dunia menjadi seakan tanpa batas, di semua sudut dan ujung dunia dapat dipantau dan diketahui secara real time. Demikian juga masalah perekonomian dan perdagangan didunia semua didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Pada masa lalu ada parodi yang membandingkan penggunaan anggaran antara TNI dengan Polri. Anggaran TNI Angkatan Darat untuk membeli tank, TNI Angkatan Laut untuk membeli kapal, AU untuk membeli pesawat, Polri untuk membeli mesin ketik sisanya untuk mengganti seragam. Betapa kecilnya kebutuhan anggaran bagi Polri sehingga setelah untuk membeli mesin ketik sisanya untuk apa lagi? Ungkapan dalam parodi di atas membeli mesin ketik dan mengganti seragam mengolok betapa pengetahuan di bidang ilpengtek begitu rendah. Seolah polisi tidak memerlukanya.

Mungkin ada benarnya ungkapan tersebut walau tidak semuanya benar. Yang dibangun dan ditonjolkan adalah pembangunan gedung kantor, fisik-fisiknya saja dan bukan pemanfaatan ilpengtek dalam berbagai infrastruktur dan sistem-sistem pendukung penyelenggaraan tugas polisi.



Penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum memerlukan infrastruktur dan sistem-sistem pendukung yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat : cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah. Sistem-sistem online , sistem-sistem pusat K3i (komunikasai, koordinadi, komando dan pengendalian serta informasi) menjadi penting bagi peningkatan kualitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada publik. Ilpengtek juga akan membantu polisi dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

#### **g. Edukasi Dan Penyiapan Sumber Daya Manusia.**

“Kami memang tidak mempunyai apa-apa , kami hanya mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang unggul”. Kalimat yang begitu kuat dari seorang profesor dari Jepang, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia unggul lah yang membuat mereka maju dan tumbuh berkembang, yang mampu mengimbangi bahkan mungkin mengungguli bangsa-bangsa eropa maupun amerika. Yang dalam konteks ini dapat dipahami bahwa sumber daya manusia adalah sebagai aset utama suatu bangsa.

Sumber daya manusia sebagai aset utama dari suatu bangsa yang berarti harkat martabatnya sebagai manusia didudukan sebagai yang seharusnya sebagai manusia. Perlakuan yang manusiawi tersebut salah satunya adalah dengan mencerdaskan dan menyiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan mempunyai keahlian atau ketrampilan apa saja yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks kepolisian, sumber daya manusia juga menjadi aset utama institusi. Sumber daya manusia inilah yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi harkat dan martabat manusia. Sumber daya manusia yang sebagai petugas kepolisian, akan mengawaki dan mengimplementasikan bagaimana polisi mampu sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Tanpa sumber daya manusia yang unggul tidak mungkin terwujud. Apalagi diawaki sumber daya manusia yang tidak berkualitas atau mungkin malah sakit terutama rohaninya. Sudah dapat dipastikan bukan kemajuan yang diperolehnya, melainkan yang sebaliknya. Tidak usah sampai sakit jiwanya, katakanlah mempunyai cara pandang yang berseberangan dengan nilai-nilai yang ideal dari kepolisian, ini sudah akan merubah arah dan tujuan. Benarlah apa yang dikatakan oleh prof. Satjipto Rahardjo bahwa polisi bekerja dengan O2H (otak, otot dan hati nuraninya).

Mengunggulkan sumber daya manusia polri bukan sebatas tugas bagian personel saja tetapi semua pimpinan di berbagai level mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas keunggulan sumber daya manusia yang berada di bawahnya. Memang perlu effort dan komitmen yang kuat, apalagi pada tingkat yang lebih tinggi. Ada pepatah



mengatakan : “ mudah membawa keledai ke tepi sungai, tetapi memasukan air ke dalam tenggorokan keledai itu bukan hal yang mudah. There is a will, there is a way.

Sumber daya manusia yang unggul selain berprestasi dalam mengimplentasikan tugas dan tanggung jawabnya juga mempunyai produk-produk sebagai bagian dari keahliannya, baik secara konseptual maupun produk-produk dari kinerjanya. Keunggulan kinerja polisi dapat dilihat dari tingkat kepercayaan dan dukungan atau legitimasi dari para pemangku kepentingan lainnya serta terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial di wilayah kerjanya. Dengan demikian warga masyarakat akan memiliki rasa aman dan nyaman sehingga mendukung aktivitas-aktivitasnya yang mensejahterakan kehidupan mereka.

#### **h. Peran dan Posisi Polri dalam Konteks yang dibutuhkan Masyarakat.**

Dalam hubungan antara masyarakat dengan polisi ada berbagai kemungkinan atau model hubungannya:

hubungan formal, hubungan kekerabatan, hubungan karena kepentingan, hubungan kemitraan, hubungan karena adanya konflik, dsb.

Dalam hubungan-hubungan tersebut ada 3 model yang ideal yang dapat dijadikan kerangka kerja para petugas polisi :

1. Hubungan yang setara (ada kesejajaran) , polisi dengan masyarakat bisa bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
2. Posisi polisi di bawah masyarakat, yaitu polisi senantiasa berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan rasa aman dan keamanan masyarakat.
3. Posisi polisi diatas sebagai pelindung, pengayom dan aparat penegak hukum yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan panutan.

Salah satu fungsi hubungan polisi yang diharapkan oleh masyarakat adalah polisi mampu memahami kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya layanan kepolisian adalah pelayanan keamanan dan pelayanan keselamatan, untuk mendukung hidup, tumbuh dan berkembangnya kualitas hidup mereka. Yang ditandai dari segala aktivitas masyarakat untuk menghasilkan suatu produksi dapat berjalan dengan sebagaimana seharusnya tanpa adanya sesuatu yang menghambat, merusak atau mematikan produktifitas mereka.

Untuk menangani berbagai hal yang menghambat, merusak atau mematikan produktifitas masyarakat polisi menangani dari berbagai pendekatan antara lain:

1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Keamanan
6. Keselamatan.
7. Kemanusiaan.
8. Edukasi.

Yang tampilannya adalah :

1. Cepat.

Yang berarti polisi cepat merespon atau cepat bertindak atas aduan atau laporan masyarakat. Pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya juga dilakukan cepat, tidak berbelit-belit.

2. Mudah

Semua pelayanan kepolisian mudah diakses baik secara manual, langsung datang ke kantor polisi, ataupun secara elektronik.

3. Nyaman

Situasi dan kondisi orang yang meminta pelayanan kepolisian adalah situasi yang nyaman dan menyenangkan. Karena tempat yang nyaman dan sikap petugas polisi yang manusiawi.

4. Informatif

Kebutuhan informasi dari kepolisian akan mudah diakses, edukatif, Inspiratif. Dan polisi mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM.

5. Komunikatif

Para petugas kepolisian mampu membuka jejaring dan saluran-saluran komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

6. Tidak diskriminatif.

Polisi bertindak fair, jujur, adil, tidak memihak dan bijaksana dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

#### i. Akuntabilitas

Produk atau hasil dari kinerja kepolisian setelah menyelenggarakan tugasnya semestinya



membuat suatu pertanggungjawaban. Yang merupakan bukti dari hasil kinerjanya yang dapat diukur, dilihat dan dirasakan manfaatnya. Baik secara konseptual (pemikiran-pemikiran untuk program-programnya baik jangka pendek, sedang, maupun panjang) atau bahkan untuk menyiapkan masa depan tidak lebih baik. Implementasi pembangunan sistem-sistem yang modern terpadu dan berkesinambungan. Situasi dan kondisi masyarakat yang aman, nyaman, selamat (terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial) dalam beraktifitas sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal tersebutlah yang tentunya akan dilihat sebagai pertanggungjawaban baik secara management maupun operasional. Dan bukan semata mata pertanggungjawaban keuangan saja, seperti apa yang dilakukan sekarang ini.

Produk kinerja baik yang berupa konseptual, managerial, operasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dipertanggung jawabkan secara bertingkat tingkat yang disesuaikan pada konteks atau lingkup tugas masing-masing. Baik secara administrasi, hukum bahkan secara moral sekaligus. Tatkala pertanggungjawaban atas kinerjanya hanya sebatas penggunaan anggaran, maka selama tidak menggunakan uang untuk dikorupsi atau disalahgunakan selesailah sudah. Dianggap berhasil melaksanakan tugas walau tidak ada manfaatnya baik secara internal maupun eksternal. Pekerjaan seorang pejabat selama menjabat atau dalam kinerjanya yang sudah dibiayai negara biasanya tidak dipusingkan, yang penting keuangan negara sesuai peruntukannya (walau ada yang tidak tepat merumuskannya) namun sudah dianggap sebagai prestasi. Namun tatkala diminta hasil yang bermanfaat bagi masyarakat atau institusi, tentu jawabannya akan hanya tolah toleh seperti munyuk ditulup. Karena kinerjanya sebatas seremonial, rapat, bahkan dapat dikatakan tidak ada yang spektakuler, pasti juga landai-landai dan biasa-biasa saja bahkan jauh dari harapan normal saja tidak tercapai. Bisa jadi selama kepemimpinannya malah menimbulkan kemunduruan atau kerugian bagi masyarakatnya.

Pertanggung jawaban merupakan suatu moralitas bagi pejabat atau suatu institusi atas penggunaan uang negara yang merupakan uang dari rakyat. Tatkala tidak membuat atau tidak ada pertanggungjawaban berarti “tinggal glanggang colong playu” (meninggalkan kekuasaan, tanpa bertanggungjawab apa hasil kerjanya, mengambil kekayaan institusi atau negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan pergi begitu saja bagai pencuri setelah berhasil mengambil barang-barang curiannya).

Orang yang bertanggung jawab adalah wujud dari orang yang beradab, tidak hanya ngabab tidak juga main sikat, transparan dan tidak mengendap-endap, yang



dikerjakannya selalu membawa manfaat, mengangkat harkat dan martabat. Martabat seorang pejabat tatkala mampu bertanggung jawab, mampu menjawab tuntutan rakyat, data akurat tidak main sulap, apa yang di percayakannya tidak menguap. Cepat, tepat, akurat dan bersahabat itu harapan rakyat, Hebatnya pejabat tatkala tidak ada yang menghujat, walau hidupnya melarat, semua ingin mendekat untuk mendapat berkat, tak peduli hujan lebat hidup sudah mau sekarat, ia tetapi melakukan yang tepat dan terus berjuang demi rakyat.

## Penutup

Pemikiran-pemikiran di atas merupakan prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum yang dapat digunakan sebagai inspirasi atau frame work refleksi profesionalisme Polri. Profesionalisme kepolisian dapat dilihat, diukur dan dirasakan secara signifikan hasilnya oleh masyarakat yaitu adanya jaminan keamanan dan rasa aman warga masyarakat dalam beraktivitas.. Dengan adanya jaminan tersebut masyarakat akan merasa aman nyaman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Dari situlah salah satu indikator untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada polisi. Profesionalisme kepolisian dapat dirasakan dan di lihat serta diukur bahwa keberadaan dan kinerjanya membawa manfaat, menjadi sandaran berlindung, simbol atau ikon persahabatan. Kepercayaan masyarakat merupakan bagian dari keberhasilan dan kesuksesan polisi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang akan berbuah pada legitimasi dan dukungan masyarakat kepada polisi. Kinerja polisi untuk mampu memahami. Kebutuhan masyarakat akan layanan kepolisian dituntut : cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel. Yang juga aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemikiran-pemikiran secara konseptual merupakan resep yang harus di racik obatnya. Resep memang tidak bisa diminum langsung. Namun resep menjadi pedoman meramu obat yang tepat untuk menyehatkan. "Minumlah Obatnya bukan Resepnya"

Sering kali kita terheran heran mendengar orang-orang yang kecewa dan mengatakan laporan hasil penelitian, survey, tesis dan bahkan disertasi dianggap tak berguna bahkan tidak ada manfaatnya karena dipikrinya tidak dapat diimplementasikan dan sebagai pepesan kosong saja. Kelemahan dari kita ini adalah pemahaman tentang konseptual dan teoritikal dan sering terjebak pada hal-hal yang teknis dan praktis-praktis. Bukan salah dan bukan tidak penting hal-hal yang teknis dan praktis tersebut, tetapi untuk level yang besar atau tingkat tinggi terlalu sederhana dan ini hanya sebatas gejala atau fakta dan tentu saja hanya untuk sekarang dan pola kajiannya serta secara pemikiran konseptuan dan managerial dapat dikatakan dangkal serta tidak mampu untuk membuat landasan dasar bagi pijakan masa depan.



Pola-pola seperti itu bisa dianalogikan orang yang sakit pergi ke dokter minta diperiksa dan di beri resep. Pasien itu saking ingin cepat sembuh maka cepat-cepat ia menelan resep itu. Beberapa hari kemudian ia komplain ke dokternya dok saya kok tidak sembuh-sembuh ya ? Dokter salah kasih obat saya. Dokter itu terheran heran dan bertanya :” obatnya sudah diminum belum ?”. “Sudah dok, setelah keluar dari ruangan ini langsung saya telan semua ?”.

“Loh itu kan harus di racik dan diramu dulu saudara kok bisa cepet minum. Coba jelaskan bagaimana saudara minum ?”

*“Resep dokter saya aduk di air hangat langsung saya telan dok”.*

*“Oooooo pantasan tidak sembuh, untung saudara tidak sakit perut. Yang saudara harus minum obatnya bukan resepnya”.*

Cerita tadi seakan cerita lucu-lucuan tetapi ini benar-benar terjadi bahkan sering sekali terjadi di antara kita, bahkan para pelakunya dengan bangga setelah minum resep dan memamerkan kalau sudah sehat dengan minum resep.

Kemampuan berpikir konseptual dan teoritikal adalah sebuah kemampuan melihat dan menembus batas ruang dan waktu serta akan memacu kreatifitas untuk :

1. Mampu belajar dan memperbaiki masa lalu.
2. Mampu menghadapi masa kini (kontemporer).
3. Mampu menyiapkan bagi generasi mendatang untuk lebih profesional, cerdas, unggul, bermoral.

Ini semua adalah dampak minum obat yang tepat, dengan segala khasiat dan kemanjurannya. Tentu bukan karena iklannya tetapi karena memang kandungan sari patinya yang unggul yang mampu mengobati dan memperbaiki organ-organ yang rusak. Obat yang tepat juga akan menyadarkan dan membangunkan dari mimpi panjang yang tidak berujung. Obat yang berkhasiat juga menjadi unggulan obat kemenangan dalam kompetensi yang fair dan sehat karena sehat akan menambah daya.

#### Daftar Pustaka

Bayley Wiliiam G, 1995, *The Encyclopedia of Police Science* ( second edition ), Newyork & London, Garland Publishing.

Bayley David H , 1994, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Dwilaksana Chryshnanda, 2004, Koban dan chuzaicho, jurnal polisi Indonesia edisi ke 6, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Dwilaksana Chryshnanda, 2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Dwilaksana Chryshnanda, 2009, Menjadi Polisi yang Berhati Nurani, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Meliala, Adrianus, 2002, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta, Kanisius.

Dwilaksana Chryshnanda, 2002, *Problema reformasi Polri*, Jakarta, Trio repro.

More, 1998, *special topics in Policing*, Cincinnati , Andreson Publishing.

Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil*, Jakarta, Gramedia

Dwilaksana Chryshnanda, 2000, Sosok Polisi Rakyat Menuju Indonesia Baru, Diskusi panel LP3HI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Penegakan Hukum Indonesia) Semarang.

Osborne, David dan Ted Gaebler, 1992 *Reinventing Government* (terjemahan : *Mewirausahakan Birokrasi*, 2005), Jakarta, Penerbit PPM

Reiner, Robert, 2000, *The Politic of The Police*, Oxford University Press.

Sinaga, Kastorius, 2008 *Membangun profesionalisme Polri*,

Suparlan Parsudi, 1997, *Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat*, makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI, jakarta, 6 Agustus 1997.

-----, 2004 (ED),

*Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Dami (Draft Persiapan Cetak), Jakarta, YPKIK

-----, 2007,

*Ilmu Kepolisian*, Jakarta, YPKIK